

DISERTASI

KEJAWEN DAN ALIRAN ISLAM

(Studi tentang Respons Kultural dan Politik
Masyarakat Kejawaen terhadap Penetrasi
Gerakan Islam Puritan
di Yogyakarta)

Dis

S 03/04

Wah

K



S. BAYU WAHYONO

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

KEJAWEN DAN ALIRAN ISLAM

**(Studi tentang Respons Kultural dan Politik
Masyarakat Kejawen terhadap Penetrasi
Gerakan Islam Puritan
di Yogyakarta)**

Dir

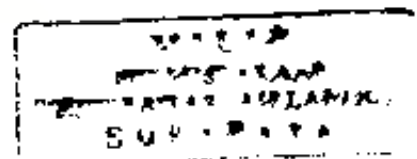
S 01/04

Wah

k

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor
dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Kamis
Tanggal : 11 September 2003
Pukul 10.00 WIB



Oleh :

S. BAYU WAHYONO
NIM. 099813177 D

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2003

Oleh

Promotor



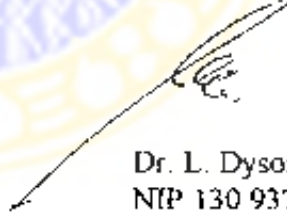
Prof. Kodiran, MA., Ph.D
NIP 130 321 347

Ko promotor I

Ko promotor II



Dede Oetomo, Ph.D.
NIP 131 453 131



Dr. L. Dyson, MA
NIP 130 937 724

Telah diuji pada
Tanggal 31 Juli 2003
PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosuebroto, MPA
Anggota : 1. Prof. Kodiran, MA, Ph.D,
2. Dede Octomo, Ph.D
3. Dr. I. Dyson, MA
4. J. Nasikun, Ph.D
5. Dr. Setyo Yuwono, MA
6. Dr. Tadjoeer Ridjal



**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
No. 6293/J03/PP/2003
Tanggal 19 Agustus 2003**

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan berkatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang telah banyak berkorban baik secara material maupun dukungan doanya yang diberikan kepada saya, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus pada kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Prof. Kodiar, MA.,Ph.D., selaku promotor yang tiada henti hentinya memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan dorongan, yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian sejak awal sampai terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan ini juga saya sampaikan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Dede Oetomo, Ph.D., selaku ko-promotor I, dan kepada yang terhormat Dr. L. Dyson, MA., selaku ko-promotor II yang juga tiada henti-hentinya memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan dorongan yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian sejak awal sampai terselesaikannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional, yang memberikan bantuan Beasiswa program pascasarjana (BPPS) kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. Med H. Puruhita, dr.,SpB., selaku Rektor Universitas Airlangga dan Prof. H. Sudarto, dr.,DTM&H,Ph.D. sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. H. Muhammad Amin,dr.,SpP., selaku Direktur Program Pasca Sarjana dan Prof. Dr. H. Soedijono,dr.,SpTHT., selaku mantan Direktur Program Pasca Sarjana, serta para asisten Direktur dan para staf administrasi Program Pasca Sarjana atas bantuannya selama saya mengikuti pendidikan di Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Prof. A. Ramlan Surbakti, MA.,Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial dan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., selaku mantan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti program studi doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Semua staf pengajar program Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,MPA., Prof. A. Ramlan Surbakti, MA.,Ph.D., Prof. Dr. Hotman Siahaan. Dr Laurentius Dyson

Ringkasan

Kejawen dan Aliran Islam: Studi tentang Respons Kultural dan Politik Masyarakat Kejawen terhadap Penetrasi Gerakan Islam Puritan di Yogyakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena bahwa ketika negara mengalami surut, setelah lebih dari tigapuluh tahun menjadi kekuatan hegemonik dan dominatif terhadap masyarakat, konflik identitas yang merujuk pada etnis, ideologi, agama, dan kebudayaan terasa semakin manifes. Masyarakat yang sebelumnya senantiasa berada pada posisi yang terkooptasi dalam relasi negara-masyarakat, menunjukkan tanda-tanda menguat dan secara bebas mengekspresikan identitasnya memanfaatkan ruang publik yang telah longgar tanpa kontrol negara. Bersamaan dengan itu, terbukannya peluang mengekspresikan identitas tersebut diikuti pula benturan antarnilai yang menjadi landasan eksistensi identitasnya. Dengan lain perkataan, iklim keterbukaan dan kebebasan mempunyai implikasi terhadap timbulnya fenomena konflik identitas antarnilai, yang sebelumnya memang potensial tetapi mampu dikendalikan secara efektif oleh kekuatan negara.

Dalam pada itu kebudayaan Jawa sebagai sistem nilai di satu pihak, dan di lain pihak gerakan Islam yang sejak awal dekade 1990-an di Indonesia mengalami kebangkitan, kembali berada dalam suasana ketegangan hubungan. Proses pergulatan mempertahankan identitas masyarakat *Kejawen* yang berlangsung secara terus-menerus dan dinamis pada satu sisi, sementara pada sisi lain kebangkitan gerakan Islam puritan terus menunjukkan eskalasinya, maka benturan kedua entitas kebudayaan itu menjadi tidak terhindarkan. Terlebih lagi keduanya berangkat dari asumsi yang sama, bahwa negara merupakan wahana yang paling efektif untuk meneguhkan identitas baik secara politik maupun kultural, sehingga pergulatan keduanya terus berada dalam konteks perebutan negara.

Petanyaan utama dalam studi ini adalah: (1) Dalam proses pergulatan kedua entitas kebudayaan dan politik tersebut, bagaimana warga masyarakat *kejawen* mempertahankan identitasnya ketika menghadapi penetrasi gerakan Islam puritan? Pada konteks itu, secara kultural apakah masyarakat kejawen dalam merespons tekanan pengaruh Islam, mengalami proses kehilangan identitasnya atau terus berupaya mempertahankannya?; (2) Secara politik bagaimana masyarakat kejawen merespons tekanan pengaruh gerakan Islam puritan, apakah terjadi proses transformasi menjadi basis pendukung partai-partai Islam, atau tetap berusaha memberikan dukungan terhadap partai-partai nasionalis yang dianggap mampu

menjamin dan memberi proteksi terhadap kelangsungan tradisi kejawen? (3) Dalam proses pergulatan antara warga masyarakat kejawen yang masih mendukung tradisi kebudayaannya dengan pendukung gerakan Islam puritan, bagaimana karakter hubungan kedua entitas tersebut? Bersifat interrelatif, kontestatif atau bahkan konfliktual?

Studi ini dilakukan di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kecamatan Ngaglik, sebuah daerah termasuk dalam wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 12 km arah utara kota Yogyakarta. Penelitian ini melihat terjadinya respons kultural dan politik masyarakat kejawen sebagai fenomena sosio-antropologis, dalam arti bagaimana respons tersebut dipaparkan dalam bentuk diskripsi budaya secara detail menurut persepsi masyarakat kejawen. Argumen ini sekaligus menjadi pertimbangan utama, mengapa penelitian ini memilih metode etnografi.

Alur pikir studi ini pada prinsipnya ingin melihat bagaimana pergulatan dua entitas struktur dan kultur, yaitu antara masyarakat santri ortodoks yang teokratik dengan masyarakat kejawen heterodoks yang sekuleristik, dalam upaya memperebutkan negara. Kedua entitas itu memiliki asumsi dan bahkan keyakinan yang sama, yaitu bahwa negara merupakan wahana sekaligus instrumen yang paling efektif untuk mengendalikan perilaku warga baik secara politik maupun kultural sebagaimana yang dikehendaki, karena watak negara yang memiliki kemampuan memaksa.

Kerangka konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena hubungan masyarakat kejawen dan Islam, khususnya yang berkaitan dengan gerakan pemurnian praktik agama, dengan mengkombinasikan tiga konsep utama, yaitu sinkretisme, etnisitas, identitas dan politik identitas. Sinkretisme selama ini menempati posisi yang cukup dominan dalam upaya menjelaskan hubungan kejawen dan Islam, khususnya di bekas daerah kerajaan Mataram. Proposisi dari segenap teoritis seperti Geertz, Benda, Ricklefs, Mulder, Stange, Suseno, dan Woodward yang selama ini memfokuskan perhatian terhadap isu kejawen melalui konsep sinkretisme yang menghasilkan formulasi Islam sinkretis.

Posisi konsep etnisitas ini digunakan untuk menjelaskan bahwa meskipun orang Jawa merupakan satu kesatuan etnis secara biologis, tetapi secara kebudayaan di dalamnya mengandung berbagai perbedaan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, teori ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana gerakan Islam puritan melakukan tekanan terhadap masyarakat kejawen. Teori ini diambil dari (Lipschutz, 1998), Benedict Anderson (2001), dan (Denis Dwyer, 1996). Sementara itu, posisi konsep identitas digunakan untuk mengetahui perbedaan identitas yang prinsipial terhadap dua entitas kebudayaan, yaitu *kejawen* dan Islam. Teori ini diambil dari perspektif dan formulasi Anthony Giddens (1960) tentang identitas person; dari Benedict Anderson (2001) tentang identitas kelompok (*nation*); dan dari Chris Barker (2000), J. Week (1990) serta S. Hall (1992) tentang teori identitas sosial dan kebudayaan.

Studi ini menemukan bahwa pada prinsipnya tipologi kebudayaan masyarakat Jawa jauh dari sifat homogen, tetapi terfragmentasi menurut kelompok-kelompok

rujukan, terutama antara masyarakat Islam puritan dan masyarakat kejawaan yang meskipun mengaku beragama Islam tetapi hanya secara nominal. Dalam pergulatannya tetap diwarnai oleh dinamika tarik-menarik kepentingan politik dan identitas kebudayaan yang bersifat kontestatif antara subkultur *santri* dan subkultur *abangan-priyayi* atau kejawaan. Konflik kultural dan politik itu semakin manifes dan dinamik, ketika kekuatan negara mulai surut. Fakta menunjukkan, yang terjadi kemudian kekuatan gerakan Islam puritan ada kecenderungan ingin menggantikan peran negara, menjadi kekuatan hegemonik baru dengan terus melakukan gerakan puritanisasi, yang berangkat dari prinsip fundamental bahwa agama dan negara adalah integralistik.

Respons secara kultural masyarakat kejawaan terhadap gerakan penguatan islamisasi ternyata menggunakan strategi yang diwujudkan dalam gerakan revitalisasi dan reproduksi ritual-ritual Jawa yang dianggap *genuine*, seperti membangkitkan dan menggairahkan kembali *jamasan* dan *kirap* pusaka, *bersih desa*, *ruwatan*, upacara *wiwit* dan *methik* padi, dan kegairahan mengunjungi tempat-tempat yang dikeramatkan.

Revitalisasi ritual-ritual masyarakat kejawaan itu dimaksudkan untuk melakukan perumitan-perumitan budaya, dengan demikian pengaruh kebudayaan luar menjadi lebih sulit masuk karena ritual-ritual itu semakin semakin meneguhkan identitas budayanya sehingga sulit ditembus. Terjadi semacam proses involusi ritual, yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat kejawaan dari penerobosan program-program puritanisasi Islam yang secara kebudayaan menyudutkan posisi kejawaan dalam posisi sulit. Perumitan ritual dimaksudkan sebagai benteng untuk melindungi masyarakat kejawaan dari pengaruh-pengaruh penguatan islamisasi yang demikian gencar dan meluas.

Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa respons politik masyarakat *kejawaan* memiliki kecenderungan besar mendukung partai-partai nasionalis sekuler yang terepresentasi pada PDI-P dan Golkar. Kesediaan menjadi basis pendukung kedua partai tersebut merupakan pilihan sadar dan rasional, karena dalam pandangan masyarakat kejawaan hanya partai-partai nasionalis sekulerlah yang bisa memberi garansi kelestarian identitas kebudayaan Jawa. Sedangkan partai-partai Islam atau yang berbau Islam, menurut pandangan mereka bagaimanapun tetap berpotensi menyingkirkan tradisi dan kesenian Jawa, untuk kemudian digantikan dengan tradisi yang berorientasi pada kebudayaan Arab yang merupakan pusat dan asal-usul Islam.

Bentuk negara sekuler berdasarkan Pancasila bagi masyarakat kejawaan sudah menjadi pilihan baku, karena itu gerakan Islam puritan yang tetap menginginkan integrasi agama dan negara senantiasa ditentang oleh masyarakat kejawaan. Studi ini menemukan fakta bahwa hingga sekarang pun usaha kelompok Islam politik yang puritan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, terus mendapat perlawanan dari kaum sekuler yang basis utamanya adalah masyarakat *abangan*. Kecil kemungkinan masyarakat kejawaan akan menyeberang menjadi basis partai-partai Islam atau yang berbau Islam, sepanjang isu di seputar hubungan agama dan negara terus dipersoalkan oleh politik Islam. Terpeliharanya sikap konsisten

masyarakat kejawen yang lebih memilih negara sekuler itu berakar pada sejarah. Raja-raja Jawa pedalaman sudah sejak dini menerapkan kebijakan politik yang membatasi peran ulama masuk ke wilayah politik kerajaan. Dengan lebih halus (*subtil*), pola seperti itu juga diterapkan oleh Soekarno dan Soeharto. Caranya dengan mengakomodasi simbol-simbol keislaman ditarik masuk ke dalam wilayah kerajaan atau negara, tetapi bersamaan dengan itu sekaligus menerapkan “pembonsaian politik” pengaruh Islam.

Studi ini membawa implikasi teoretik, bahwa penjelasan teoretik tentang hubungan kejawen dengan Islam yang menggunakan konsep sinkritisme yang selama ini masih dominan, perlu dipertanyakan. Di sana yang terjadi sesungguhnya bukan sinkritisme, karena dua entitas yang berjumpa itu tidak mengalami proses saling-memakai baik secara teologis maupun lebih-lebih secara kultural. Bahkan yang terjadi hubungan konfliktual yang saling menghilangkan, sehingga dua-duanya tetap tegak dengan landasan eksistensinya masing-masing. Implikasinya sangat absolut, orang menjadi santri tidak mungkin *abangan*, sebaliknya orang *abangan* tidak bisa disebut santri atau semi-santri baik secara teologis maupun kultural. Bahwa masyarakat *abangan* memeluk Islam, lebih karena pilihan formalitas karena negara hanya memberi kesempatan pilihan pada lima agama yang didefinisikan sebagai agama resmi. Dengan demikian, kesimpulan Ricklefs (1979) dengan melanjutkan temuan Geertz yang membuat kategorisasi atau tipologisasi dengan mem-*breakdown* masyarakat Jawa menjadi lebih rumit seperti *santri-priyayi*, *abangan-santri* dan seterusnya, tidak representatif lagi. Begitu pula studi Muhammad Pranowo (1994) dengan temuan bahwa terjadi semakin menguatnya budaya santri di wilayah kejawen yang sekaligus menegaskan bahwa polarisasi *santri-abangan* tidak valid, itu boleh jadi hanya terjadi pada masyarakat di lingkungan pesantren tempat ia meneliti. Di samping itu Pranowo mengesampingkan atau memang sengaja menyembunyikannya suatu realitas bahwa pondok pesantren di wilayah mataraman sebagian besar santrinya datang dari luar daerah, yaitu dari daerah yang memang basis santri.

Oleh karena itu, untuk memahami masyarakat kejawen dengan formulasi teoretik yang dikemas dalam format sinkretisme barangkali tidak terlalu berlebihan jika dikatakan sebuah tarikan kesimpulan teoretik yang terburu-buru. Sinkretisme asumsi-asumsinya bersifat statis, kurang mengandaikan adanya relasi kebudayaan yang senantiasa dinamik. Sinkretisme dianggap sebagai sebuah hasil final dari proses negosiasi dan resistensi kultural, padahal proses itu masih belum selesai. Dengan demikian sinkretisme itu boleh dianggap sebagai semacam fase yang bersifat tentatif, semacam situasi gencatan senjata kultural (*cultural cease fire*). Selanjutnya proses saling tawar-menawar itu terus berlangsung dengan penuh dinamika, sehingga yang lebih tepat adalah bahwa hubungan kejawen dan Islam bersifat konfliktual dari dua entitas yang pada hakekatnya memang berbeda.

Dalam pada itu, penjelasan dan kesimpulan yang ditarik oleh studi-studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mark Woodward (1989), Andrew Betty (1996), dan sebagian juga dilakukan Clifford Geertz (1960), Muhammad Pranowo (1992), Koetjaraningrat (1984) Simuh (1995) dan lain-lain yang menggunakan sinkretisme

sebagai konstruksi utama tentang masyarakat *kejawen* dalam hubungannya dengan Islam masih problematik. Terlebih lagi berbagai studi yang dilakukan pada era Orde Baru, terutama oleh sejumlah peneliti dari pendukung *developmentalism* yang suka dengan konsep sinkretisme, terasa kurang mewakili realitas empirik karena bias paradigma konsensus yang pada masa itu tidak biasa dengan pendekatan konflik.



SUMMARY

Kejawen and Islam: Study about Cultural and Political Response of *Kejawen* Society against The Pressure from Puritan Islamic Movement in Yogyakarta

This study is based on a phenomenon suggesting that when the state is weakening, whereas it had showed its domination and hegemonic power over the people for more than thirty years, conflicts of identity rooted from different ethnical, religious and cultural backgrounds are strongly manifested. The people who used to always be co-optated in their relation with the state gain more power and have more freedom to express their identity using public spaces which are no longer controlled by the state. At the same time such kind of freedom to express their identity leads to conflicts among values as bases of their identity. In other words, the openness and freedom implicate to emerging identity conflicts among values which were apparently potential threat but could be effectively controlled by the power of the state

Meanwhile, Javanese culture as a value system and as an Islamic value, which has been strengthening in the past ten years, get back into problematic relation. Struggles to maintain identity of Javanese society continue, and at the same time Islam is emerging, therefore conflict between the two is apparent

The main questions to this study are : (1) In the conflicting process between Javanese and Islamic concepts, how do the Javanese society or *kejawen* group persist their supports to Javanese traditions in order to maintain their identity against the penetration of puritan Islamic movement ? In this context, are the *kejawen* society culturally losing their identity or persisting in response to the pressure of Islam ? , (2) Politically, how do *kejawen* society respond the pressure resulting from puritan Islamic movement, do they experience transformation processes by supporting Islamic political parties, or do they continue supporting nationalistic parties that may guarantee to give protection to the sustainability of Javanese traditions ?; (3) In the rivalry between *kejawen* society who maintain their cultural tradition and those who support the puritan Islamic movement, how is the nature of the relation of these two entities ? Is it interrelating; contesting, or even conflicting ?

This study is conducted in Ngaglik district of Sleman regency, Yogyakarta special province, around 12 kilometers north of Yogyakarta City. This study examines the cultural and political response processes of *kejawen* society as socio-anthropology phenomenon in the context of how the response is presented in the form of detailed cultural description according to the perception of *kejawen* society. This

argument is used as the main consideration why the study uses ethnographical approach.

The structure of the study is basically to look at how two entities, namely structure and culture compete to each other, that is between *santri* orthodox society who are theocratic and heterodox *kejawen* society who are secular, in fighting for the state. These two entities have common assumption and faith, that the state is a vehicle and an effective instrument to control the behavior of the people, either politically or culturally because naturally the state has the mandatory power.

The concept framework to explain the relation between *kejawen* and Islamic societies, especially regarding to purification of religious practices, is by combining three main concepts, namely syncretism, ethnicity, identity and politics of identity. Syncretism has thus far been dominant in the explanation about relation between *kejawen* and Islam, particularly at the former territory of Mataram kingdom. This proposition is taken from theorists such as Geertz, Benda, Ricklefs, Mulder, Stange, Suseno, and Woodward who have been focused their attention on issues of *kejawen* through syncretism concept resulting to the syncretic Islamic formulation.

The position of this ethnicity concept is applied to explain that, although Javanese people are biologically one single ethnicity, their culture have differences. As a social construct, this theory has been used to explain how puritan Islamic movement give pressure to the *kejawen* society. This theory is derived from Lipschutz, (1998), Benedict Anderson (2001), and Denis Dwyer (1996). Meanwhile, the position of identity concept is utilized to find out essential identity differences of the two Javanese entities, *kejawen* and Islam. This theory is derived from perspectives and formulation by Anthony Giddens (1960) about group identity (nation); and from Chris Barker (2000), J. Week (1990) and S. Hall (1992) about theory of cultural and social identities.

This study finds out that cultural typology principles of the culture of Javanese society is far from being homogeneous, but is fragmented according to reference groups, especially between puritan Islamic society and *kejawen* society, who claim to be Islam but only nominal. Their struggle is always marked with vested interest in politics and cultural identity which tend to always be conflicting between *santri* and *abangan-priyayi* or *kejawen* subcultures. The cultural and political conflicts are manifested more strongly and dynamically when the power of the state is weakening. What happens is that Islam wants to replace the roles of the state to become new hegemonic power by intensifying puritan movement, which starts from the fundamental principle that the state and religion are integral.

Cultural response of the *kejawen* society towards strengthening of Islamization is apparently using strategies expressed in the forms of revitalization and reproduction of Javanese rituals considered to be genuine, such as preserving ceremonies of *jamasan*, *kirab pusaka*, *bersih desa*, *wiwit* and *methik padi* ceremonies, as well as visiting sacred places.

Revitalization of *kejawen* society's rituals is meant to complicate the culture so as to prevent other cultures to penetrate since the rituals will help strengthen their

cultural identity. What happens is something like ritual involution which is meant to protect *kejawan* society from infiltration of puritan Islamic programs which culturally put the *kejawan* society into difficult position. Rituals complication is also meant to protect *kejawan* society from the influences of strengthening Islamization.

This study finds out that the *kejawan* society has the tendency to support nationalistic secular political parties which are represented by PDI-P and Golkar. Their decision to support these parties is consciously and rationally taken, because *kejawan* people think that only nationalistic secular parties will guarantee the everlasting of the Javanese culture. Whereas Islamic and Islamic-based parties, according to their opinion, is potential threat to the existence of Javanese traditions and arts, and will be replaced by tradition with Arabic orientation which connotes to the center and origin of Islam.

Secular state based on Pancasila, according to *kejawan* society, is the best choice therefore puritan Islamic movement demanding the integration of the state and religion is always opposed by the *kejawan* people. This study finds out that up till now, political struggles by puritan Islam to establish Indonesia as an Islamic nation is always opposed by secular group whose main bases are *abangan* society. It is hardly possible that *kejawan* society will support Islamic or Islamic-based parties when issues concerning relation between religion and the state is addressed by Islamic political movement. The *kejawan* consistency to support secular state is rooted from the history. Right from the beginning, the inland Javanese kings had the policies of refraining the roles of ulema from entering political area of the kingdoms. In a subtle way, such a policy was also applied by Soekarno and Soeharto. What they did was putting Islamic symbols into the area of the kingdom or the state, but at the same time they had political downgrading towards Islamic influences.

This study bears theoretical implication, that theoretical explanation about relation between *kejawan* and Islam using syncretism concept which has been dominant so far, is questionable. It is not syncretism, because the meeting of the two entities does not encourage mutual usage process either theological or cultural. The relation is more conflicting and dismissing, and both of them remain stand still with their own existence. Its implication is absolute, that those becoming *santri* will never become *abangan*, or the *abangan* cannot be called as *santri* or *semi-santri* either theologically or culturally. If the *abangan* people are Islam, it is only a matter of formal choices since the state gives only five authorized religions. Therefore, Ricklefs conclusion (1979) continuing Geertz findings that make categorization and typologization by breaking-down Javanese society into a more complicated groups of *santri-priyayi*, *abangan-santri*, and so forth, is no longer representative. Even so the findings of Muhammad Pranowo (1994) that the *santri* culture is strengthening in the *kejawan* area and suggest that polarization of *santri-abangan* is not valid, must only happen to the people living surrounding the *pesantren* or Islamic boarding schools, where he conducted the research. In addition, Pranowo ignored, or concealed the fact that most of *santris* or students of Islamic boarding schools in the former Mataram territory come from other areas, which happen to be the center of *santri*.

To understand *kejawen* society using theoretical formulation of syncretism format is an exaggeration or a rushed theoretical conclusion. Syncretism has static assumptions, with less thought about cultural relations, whereas the process is incomplete. In this regard, syncretism might be considered as a kind of tentative phase, a type of cultural ceasefire. The bargaining processes remain continue dynamically, so that the nature of the relation between *kejawen* and Islam is conflicting of two entities which are basically different.

On the other hand, explanation and conclusion in the previous studies such as those conducted by Mark Woodward (1989), Andrew Betty (1996), and partly by Clifford Geertz (1960), Pranowo (1992), Koentjaraningrat (1984), Simuh (1995) and the others, who used syncretism as the main construction about *kejawen* society and its relation with Islam can be considered as less representative. Moreover, studies conducted during the New Order era, particularly those conducted by researchers supporting developmentalism who were fond of syncretism concept were less representative to the empirical reality because of consensus paradigm biases in which conflicting approaches were kept away at that time.



ABSTRACT

KEJAWEN AND ISLAMIC: STUDY ABOUT CULTURAL AND POLITICAL RESPONS OF KEJAWEN SOCIETY AGAINST THE PRESSURE FROM PURITAN ISLAMIC MOVEMENT IN YOGYAKARTA

The aims of this research is to find out of explanation about cultural and political respons kejawen society to the pressure resulting from puritan Islamic movement . This study is conducted in Ngaglik district of Sleman regency, Yogyakarta Special Province, around 12 kilometers north of Yogyakarta City. This study examines the cultural and political response processes of *kejawen* society as socio-anthropology phenomenon in the context of how the response is presented in the form of detailed cultural description according to the perception of *kejawen* society. This argument is used as the main consideration why the study uses ethnography method.

This study finds out that cultural typology principles of the culture of Javanese society is far from being homogeneous, but is fragmented according to reference groups, especially between puritan Islamic society and *kejawen* society, who claim to be Islam but only nominal. Their struggle is always marked with vested interest in politics and cultural identity which tend to always be conflicting between *santri* and *abangan-priyayi* or *kejawen* subcultures. The cultural and political conflicts are manifested more strongly and dynamically when the power of the state is weakening.

This study finds out that the *kejawen* society has the tendency to support nationalistic secular political parties which are represented by PDI-P and Golkar. Their decision to support these parties is consciously and rationally taken, because *kejawen* people think that only nationalistic secular parties will guarantee the everlasting of the Javanese culture. Whereas Islamic and Islamic-based parties, according to their opinion, is potential threat to the existence of Javanese traditions and arts, and will be replaced by tradition with Arabic orientation which connotes to the center and origin of Islam.

This study bears theoretical implication, that theoretical explanation about relation between *kejawen* and Islam using syncretism concept which has been dominant so far, is questionable. It is not syncretism, because the meeting of the two entities does not encourage mutual usage process either theological or cultural. The relation is more conflicting and dismissing, and both of them remain stand still with their own existence. Its implication is absolute, that those becoming *santri* will never become *abangan*, or the *abangan* cannot be called as *santri* or *semi-santri* either theologically or culturally.

Keywords: kejawen society, puritan Islamic movement, conflict, state, and cultural and political respons.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penetapan	iii
Halaman Ucapan Terima Kasih	iv
Halam Ringkasan	vii
Halaman Summary	xii
Halaman Abstract	xvi
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xx
Daftar Bagan	xxi
Daftar Lampiran	xxii
Daftar Istilah	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.1.1 Kebangkitan Islam	4
1.1.2 Kebangkitan Kejawaan	16
1.1.3 Studi Terdahulu Seputar Isu Hubungan Kejawaan dan Islam	22
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	42
1.3 Tujuan Penelitian	44
1.4 Manfaat Penelitian	45
1.5 Batasan dan Alur Penelitian	46
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	59
2.1.1 Konsep-konsep Utama dalam Masyarakat Kejawaan	59
2.1.2 Konsep Kepercayaan Jawa	62
2.1.3 Dunia Batin Orang Jawa	68
2.2. Landasan Teori	71
2.2.1 Konsep Sinkretisme	71
2.2.2 Konsep Etnisitas	75
2.2.3 Konsep Identitas dan Politik Identitas	79
2.3 Kerangka Konseptual	95

BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	101
3.2 Jenis Penelitian	104
3.3 Prosedur dan Jalannya Penelitian	110
BAB 4 SEJARAH HUBUNGAN KEJAWAAN DAN ISLAM DI JAWA TENGAH	
4.1. Konteks Kultural	123
4.1.1 Periode Kerajaan Demak	124
4.1.2 Periode Abad Ke-17 dan Ke-18	130
4.1.3 Periode Abad Ke-18 dan Ke-20	138
4.2 Konteks Politik	147
4.2.1 Pasca Kerajaan Majapahit	148
4.2.2 Perebutan Pengaruh Sunan Kudus versus Sunan Kalijaga	150
4.2.3 Islam dan Politik Kerajaan Mataram	153
4.2.4 Islam dan Kejawaan di Masa Pemerintahan Kolonial	158
4.2.5 Pergulatan Politik Islam dan Nasionalis Zaman Pergerakan	161
4.2.6 Pergulatan Politik Islam dan Nasionalis Era Kemerdekaan	167
4.2.7 Hubungan Kejawaan dan Islam Era Orde Baru	173
BAB 5 DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
5.1 Selintas Sejarah Sleman	178
5.2 Kecamatan Ngaglik: Penguatan Islamisasi di Lereng Merapi	186
5.3 Gerakan Penguatan Islam Puritan	193
5.4 Penguatan Islamisasi dalam Dinamika Organisasi	201
5.5 Islamisasi dalam Berbagai Ritual Jawa	206
BAB 6 RESPONS KULTURAL MASYARAKAT KEJAWAAN ATAS PENGUATAN ISLAMISASI	214
6.1 Kelompok "Bodo": Aliran Kebatinan Jawa	232
6.2 Tempat-tempat Keramat	239
6.3 Bulan Puasa	244
6.4 Wayang yang Terus Diperebutkan	251
6.5 1 Suro Tahun Baru Jawa	259
6.6 Jathilan dan Ritus Kesurupan	267
6.7 Kulnuwun versus Assalamu'alaikum	274
6.8 Soal Pengeras Suara	279
6.9 Upacara Kematian dan Pandangan terhadap Kematian	283
6.10 Catatan Akhir	291

BAB 7 RESPONS POLITIK MASYARAKAT KEJAWAAN ATAS PENGUATAN ISLAMISASI	295
7.1 Penetrasi Politik Santri terhadap Kesenian Jawa	308
7.2 Politik Santri dan Isu Global	328
7.3 Perilaku pada Hari-hari Nasional	341
BAB 8 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORETIK	
8.1 Kesimpulan	354
8.1.1 Respons Kultural Masyarakat Kejawaan	354
8.1.2 Respons Politik Masyarakat Kejawaan	360
8.1.3 Hubungan Kontestatif Islam dan Kejawaan	366
8.2 Implikasi Teoretik	374
8.3 Refleksi	388
DAFTAR PUSTAKA	399
Lampiran-lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 5.1 : Perbandingan jumlah orang naik haji Dekade 1980-an Dan 1990-an di Kabupaten Sleman Yogyakarta	197
Tabel 5.2 : Perbandingan jumlah tempat ibadah Islam di Kecamatan Ngaglik dekade 1920-1980-an dengan 1990-an	199
Tabel 5.3 : Jumlah pondok pesantren, ustad, dan santri di Kabupaten Sleman Yogyakarta	204
Tabel 5.4 : Jumlah perkumpulan kesenian di Desa Sukoharjo	211
Tabel 7.1 : Hasil perolehan suara 8 Partai Besar dalam Pemilu 1999 Di Kecamatan Ngaglik	307
Tabel 7.2 : Hubungan orientasi kebudayaan Jawa dan pilihan Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	321

Daftar Bagan

Bagan 1.1 : Alur pikir penelitian	58
Bagan 2.1 : Kerangka konseptual	100



Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	409
Lampiran 2 : Sketsa Peta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	410
Lampiran 3 : Sketsa Peta Kecamatan Ngaglik	411



Daftar Istilah

- Abangan*: golongan yang meskipun dikategorikan pengikut Islam, tetapi tidak mematuhi ajaran-ajaran Islam. Sering juga diartikan sebagai Islam nominal
- Bid'ah*: mengada-adakan yang tidak ada rujukannya dari ajaran Nabi Muhammad.
- Blangkon*: sejenis penutup kepala (topi) untuk laki-laki Jawa yang terbuat dari kain batik
- Danyangan*: tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat *kejawen* karena dianggap dihuni oleh makhluk halus.
- Jamasan Pusaka*: suatu kebiasaan membersihkan pusaka atau senjata tradisional seperti keris dan tombak yang disertai dengan ritual-ritual mistis.
- Jathilan*: tarian rakyat tradisional yang dilakukan secara tim dengan beragam unsur kesenian atau merupakan kombinasi dari berbagai jenis tarian, seperti *wayang wong*, kuda lumping, kethoprak, dan sirkus. Sebagaimana kesenian Jawa, kesenian ini juga mengandung mistisisme.
- Karonsih*: nama tarian klasik Jawa yang menggambarkan kemesraan sepasang Dewa Cinta, yaitu Dewi Ratih dan Kamajaya.
- Kesripahan*: peristiwa meninggalnya salah satu anggota keluarga
- Kawruh sangkan paraning dumadi*: suatu pengetahuan (*kawruh*) tentang asal (*sangkan*) dan tujuan (*paran*) segala apa yang diciptakan (*dumadi*).
- Kethoprak*: kesenian rakyat dalam masyarakat *kejawen* yang berbentuk teater panggung dengan sumber cerita dari sejarah Jawa.
- Khurafat*: pecampuradukan antara ajaran normatif agama dengan tradisi lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid Islam.
- Layon-layon*: mengabarkan kepada sanak keluarga bahwa ada salah satu anggota keluarga ada yang meninggal dunia.
- Leluhur*: anggota keluarga yang sudah meninggal, tetapi konotasinya lebih pada nenek moyang.

Lala-legawa: kerelaan hati yang sangat tulus

Manthar-mamembah: suatu situasi psikologis ketika sedang fokus dalam berkomunikasi dengan Tuhan

Manunggaling Kawula Gusti: konsep kepercayaan masyarakat Jawa bahwa Tuhan bisa menyatu dengan manusia yang dapat dicapai dengan *laku prihatin* dan *semedi* (meditasi) yang amat sulit.

Mbau Rekso: makhluk halus yang menunggu tempat-tempat keramat

Mudokareni: sebuah acara ritual menjelang perkawinan dalam serangkaian acara perkawinan dalam adat Jawa.

Mutamakin: tokoh esotoris masyarakat kejawen abad 18 di era Ketib Anom Kudus yang dijatuhi hukuman mati oleh ulama eksoteris karena dianggap menyebarkan ajaran sesat menurut versi Islam normatif, tetapi kemudian diberi ampunan oleh Raja Kartasura, Paku Buwono II (1726-1749).

Nyadran: kebiasaan masyarakat *kejawen* pergi ke makam leluhurnya dengan berdoa dan menabur bunga.

Nyai Roro Kidul: Tokoh imajinar masyarakat *kejawen* yang dipercaya sebagai Dewi Laut Selatan.

Primbon: buku yang berisi tentang perhitungan hari (*petungan dina*), gejala-gejala, tanda-tanda, yang digunakan sebagai pedoman tindakan masyarakat *kejawen*. Bisa juga dipahami sebagai sebuah buku yang berisi tentang berbagai macam petungan Jawa, dan oleh masyarakat *kejawen* dipakai sebagai struktur normatif yang mengendalikan tindakan manusia.

Raga sukma: kemampuan seseorang memisahkan diri dengan raganya, sementara jiwanya menghadap Sang Pencipta.

Rawatan: suatu kegiatan ritual mistis masyarakat *kejawen* yang bermaksud mencari keselamatan hidup dengan tata upacara yang penuh simbol.

Sapta Darma: nama perkumpulan organisasi kebatinan dalam masyarakat *Kejawen*.

Sumarah: nama salah satu organisasi penghayat kepercayaan dalam masyarakat *kejawen*.

* *Sapu Jagad*: nama makhluk halus yang oleh masyarakat *kejawen* dianggap sebagai Dewa penjaga Gunung Merapi.

Semedi: tindakan orang Jawa yang melakukan komunikasi dengan Tuhan dengan posisi duduk sempurna, diam, dan berada dalam tempat yang sunyi

Serat Centhun: semacam ensiklopedi mengenai "dunia dalam" masyarakat *kejawen* ditulis pada tahun 1814, sering juga disebut sebagai Suluk Tembangraras-Amongragga

Sunan Kalijaga, tokoh mistis Islam yang oleh masyarakat Jawa dipercaya sebagai anggota Wali Sembilan. Disebut-sebut tokoh ini berasal dari Cirebon, dan kemudian mendirikan lembaga perguruan Jawa di Demak, salah satu murid elite-nya adalah Hadiwijaya, raja Pajang. Tokoh yang sangat berpengaruh bagi raja-raja Jawa pedalaman ini, senantiasa bersaing dengan Sunan Kudus dalam memperebutkan murid aristokratik.

Syeh Siti Jenar: Tokoh mistik masyarakat *kejawen* yang dihukum mati oleh golongan Islam puritan, karena dianggap melanggar ajaran Islam normatif.

Tapa ngrame: kegiatan seseorang yang memfokuskan diri hanya untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan tanpa mengharap imbalan apa pun.

Ular-ular: wejangan yang bersumber dari ajaran-ajaran Jawa yang dilakukan dalam forum pertemuan.

Ulem: surat undangan untuk acara perkawinan.

Weweruhan: suatu keadaan ketika orang sedang melihat keanehan-keanehan peristiwa, biasanya berkaitan dengan makhluk halus.